Kementerian PPN/
Bappenas

# INDEKS PEMBANGUNAN INKLUSIF KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Amalia Adininggar Widyasanti, PhD

Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan

# PENTINGNYA DISAGREGASI INDEKS KE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kementerian PPN/ Bappenas

**INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF**

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat inklusivitas pembangunan di Indonesia.

Indonesia terdiri dari 514 kab/kota dengan karakteristik berbeda sehingga prioritas pembangunan di tingkat daerah bisa jadi berbeda dengan tingkat nasional.

Disagregasi ke tingkat kab/kota merupakan sebuah upaya memonitor tingkat inklusivitas pembangunan pada level kabupaten/kota agar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dapat lebih presisi sesuai prioritas pembangunan daerah masing-masing.

# DISAGREGASI INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI KABUPATEN/KOTA

Kementerian PPN/ Bappenas

**460 Kabupaten/Kota dapat dihitung dan dimonitor perkembangan indeks inklusifnya dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia.**

**Kabupaten/Kota yang belum dapat dihitung karena ada perbedaan data yang didapatkan dari OJK (terkait data keuangan – indikator keuangan inklusif) dengan data dari BPS.**

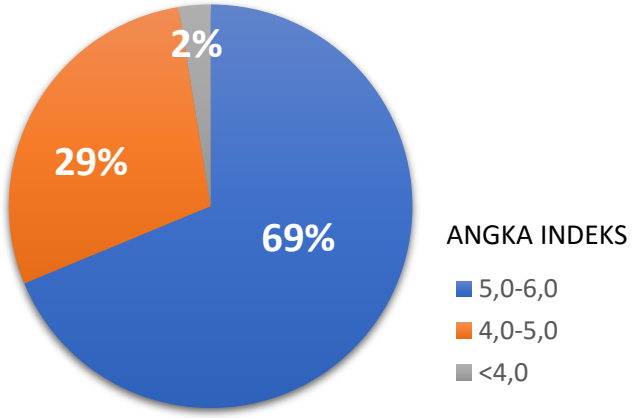


Persentase Kab/Kota di Indonesia

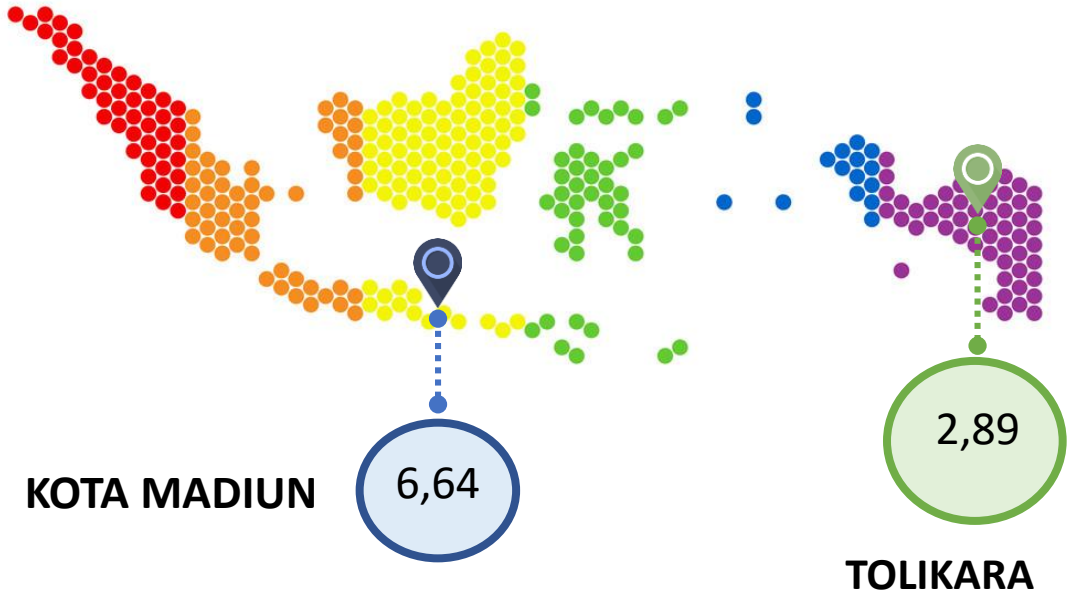


**Angka indeks pembangunan ekonomi inklusif di tingkat kabupaten/kota ditujukan untuk membandingkan posisi antar kab/kota di seluruh Indonesia.**

# 30 KABUPATEN/KOTA DENGAN ANGKA INDEKS TERTINGGI DI INDONESIA 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

- 17 kab/kota di pulau Jawa
- 9 kab/kota di pulau Sumatera
- 2 kab/kota di pulau Bali/NT
- 1 kab/kota di pulau Kalimantan
- 1 kab/kota di pulau Sulawesi

**Angka median indeks kabupaten/kota adalah 5.25**

**Angka rata-rata indeks kabupaten/kota adalah 5.23**

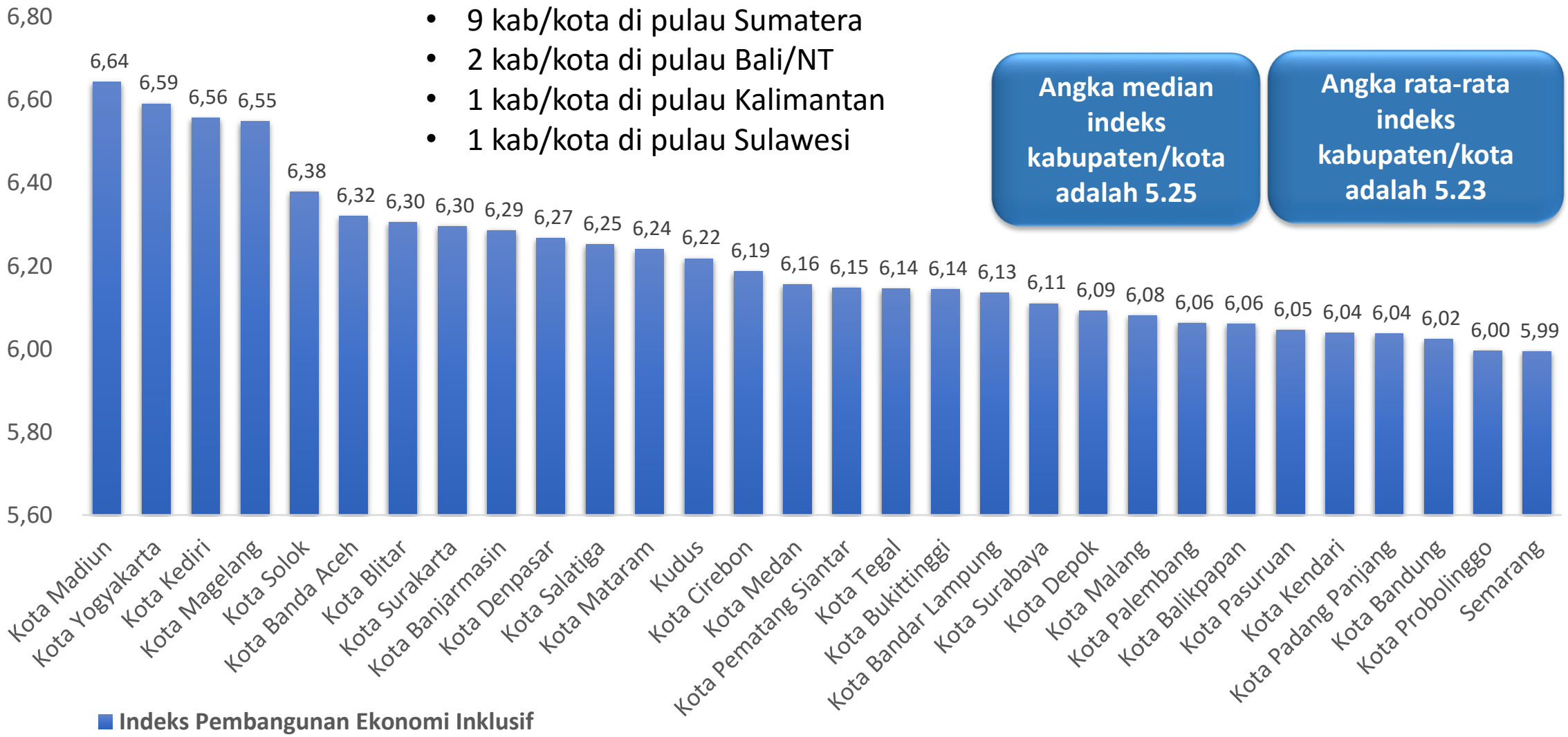

# 30 KABUPATEN/KOTA DENGAN ANGKA INDEKS TERENDAH DI INDONESIA 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

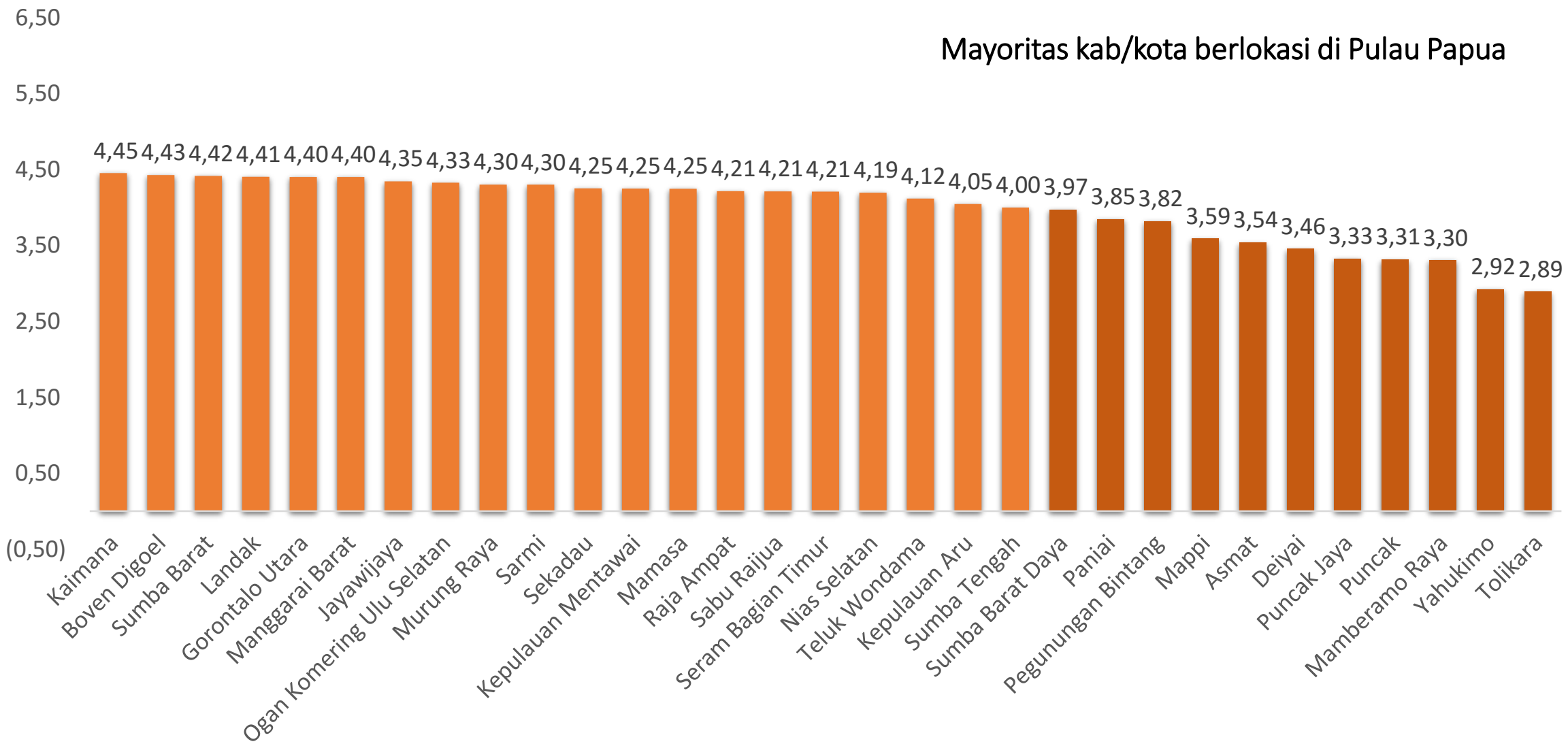

# 10 PERINGKAT TERTINGGI DAN TERENDAH KABUPATEN/KOTA

Kementerian PPN/ Bappenas

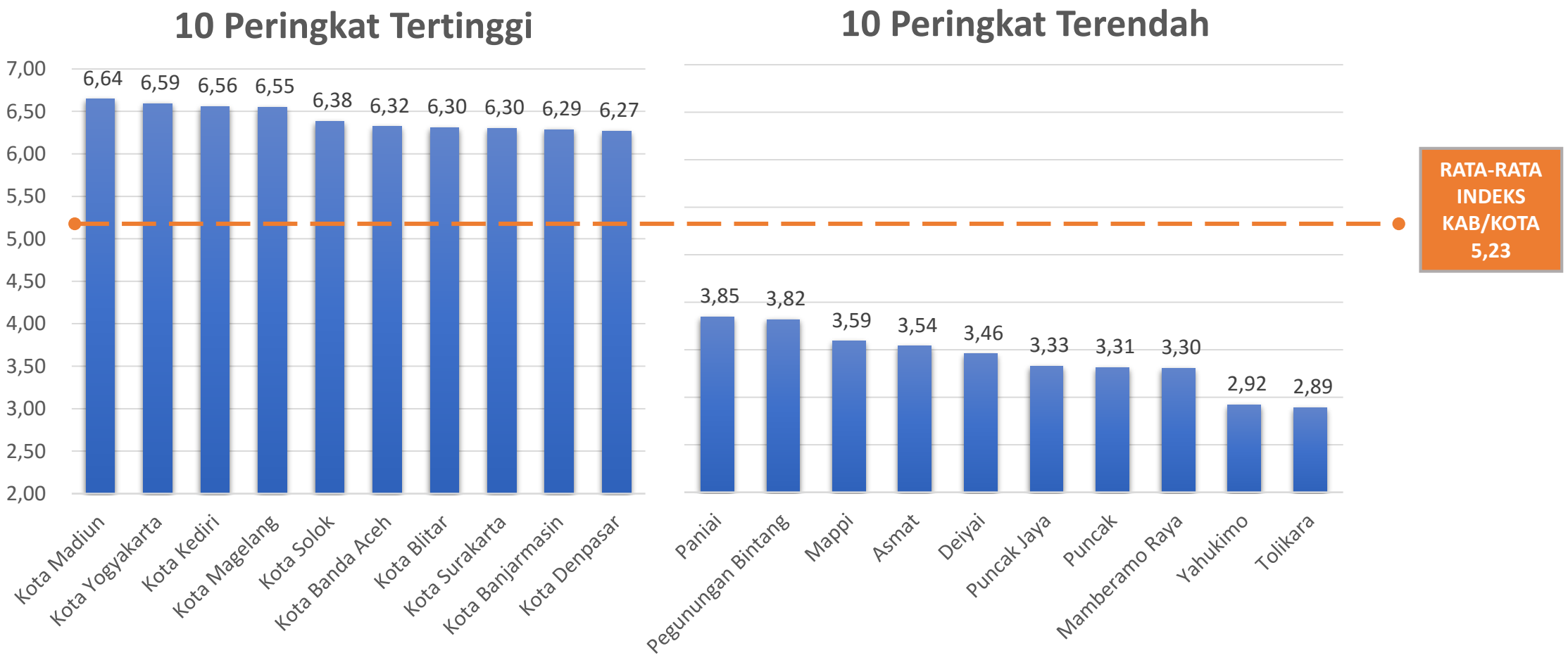

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF KAB/KOTA DI INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

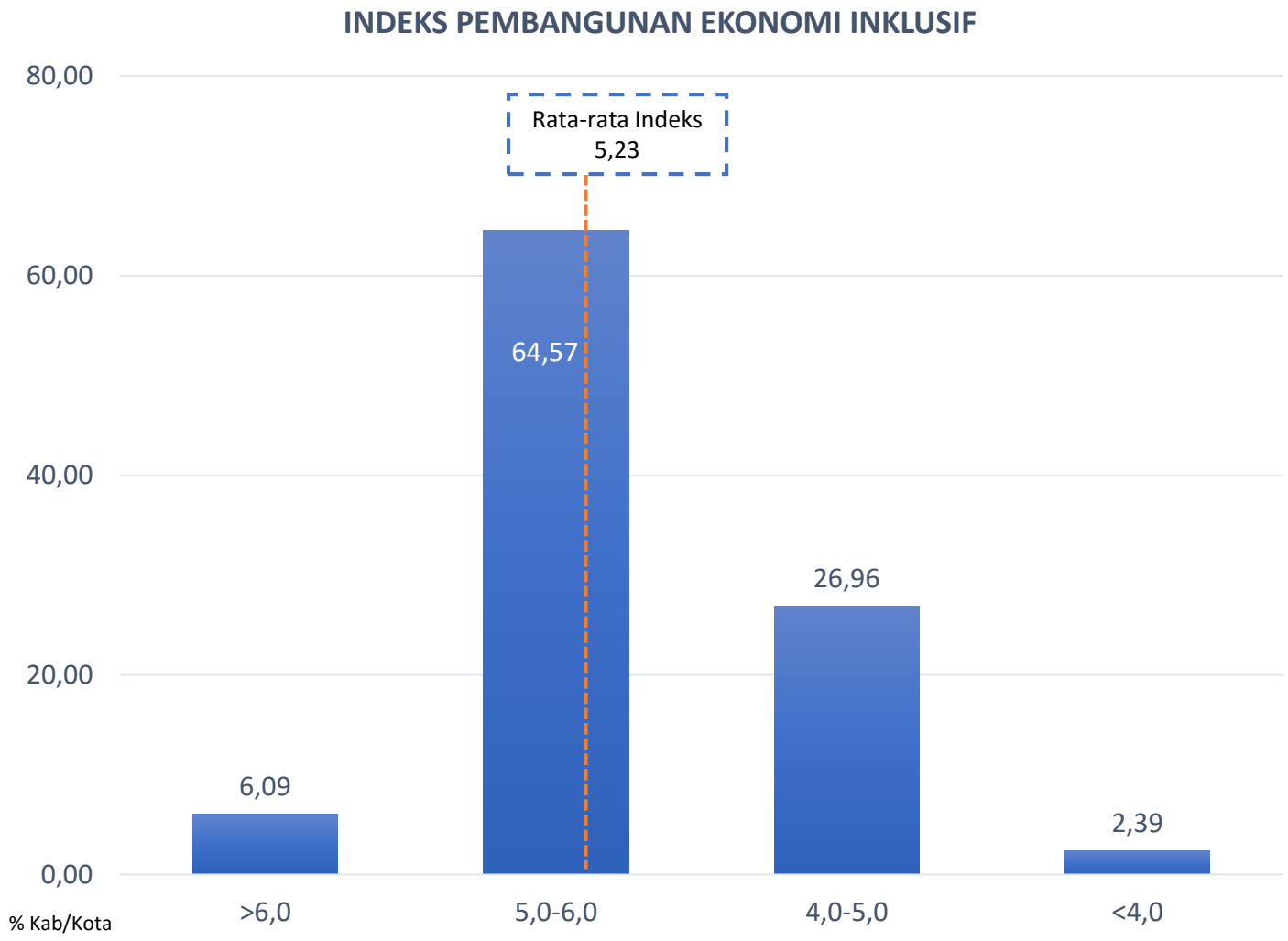


Indeks tertinggi banyak diraih oleh kab/kota di wilayah barat Indonesia. Sementara indeks terendah diraih oleh kab/kota di wilayah timur Indonesia.

Fokus pembangunan selama ini masih belum seragam antar-kab/kota. Wilayah timur Indonesia masih tertinggal dari aspek ekonomi maupun sumber daya manusia dan infrastruktur dasar.

Untuk meningkatkan inklusivitas pembangunan, pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia harus dijadikan prioritas pembangunan.

# PILAR 1: INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kementerian PPN/ Bappenas

## PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

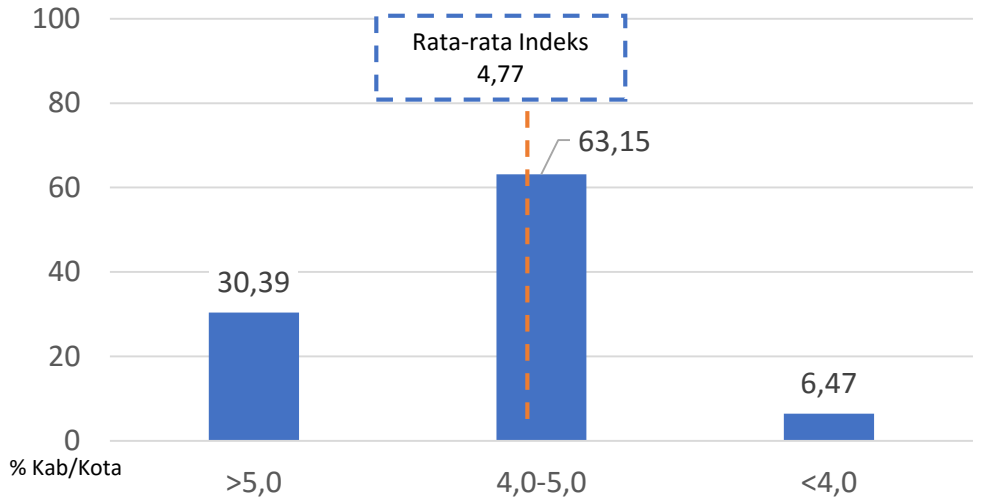


## PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

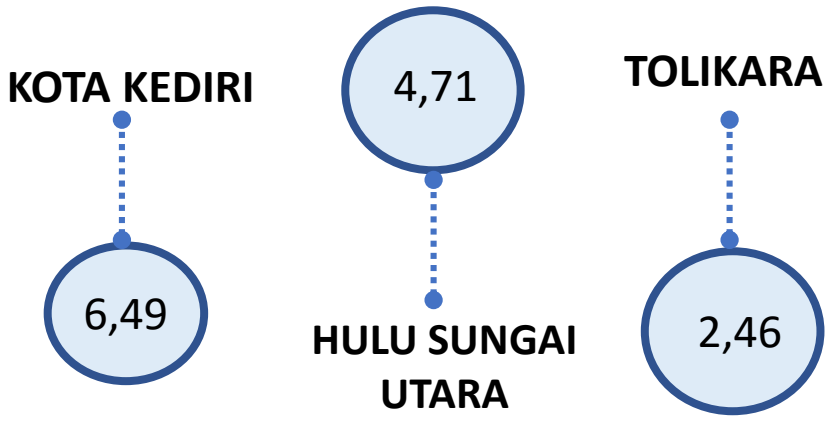


## PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN ANGKA INDIKATOR DI ATAS ANGKA INDIKATOR NASIONAL

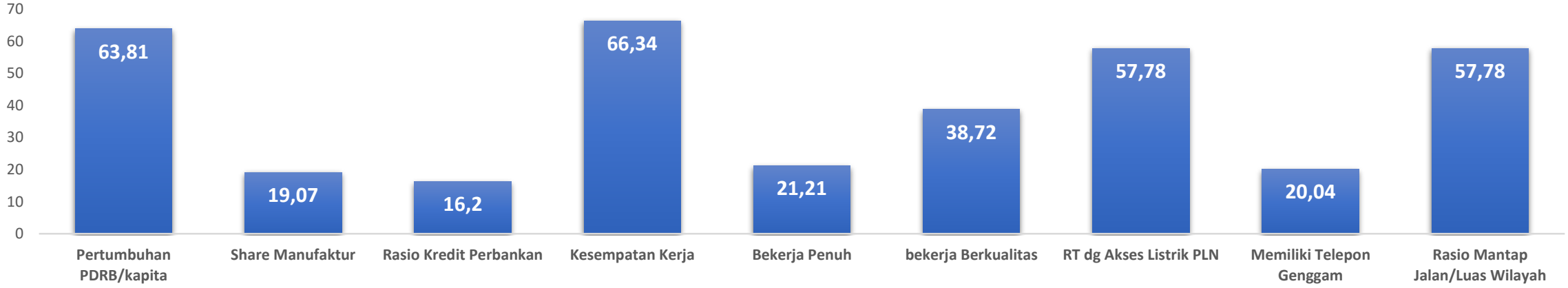

# PILAR 2: INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kementerian PPN/ Bappenas

## PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

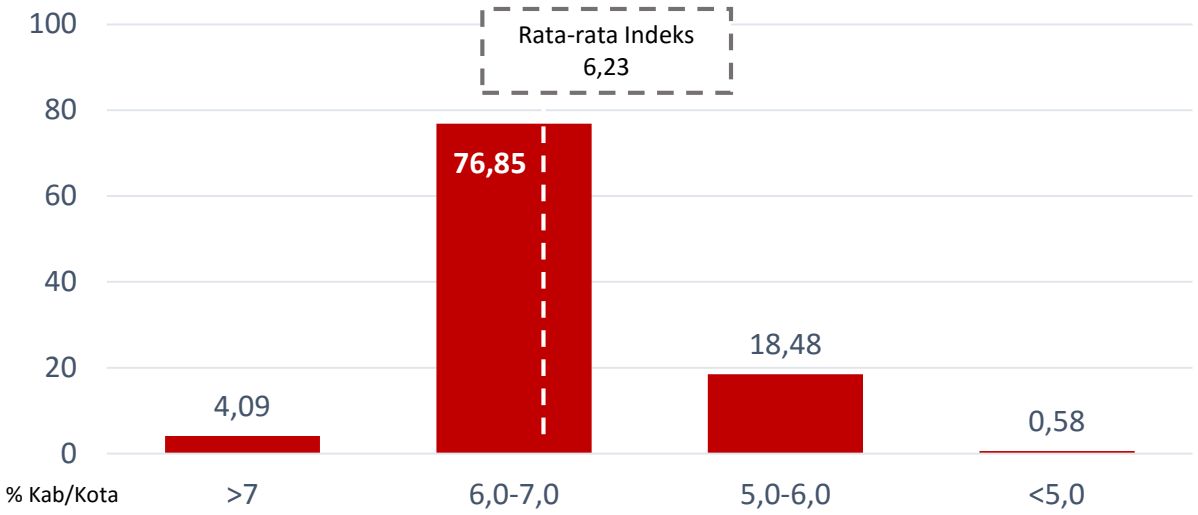


## PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

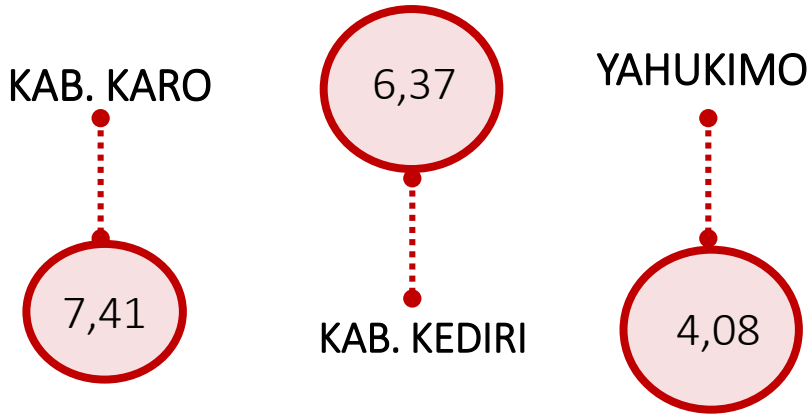


## PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN ANGKA INDIKATOR DI ATAS ANGKA INDIKATOR NASIONAL

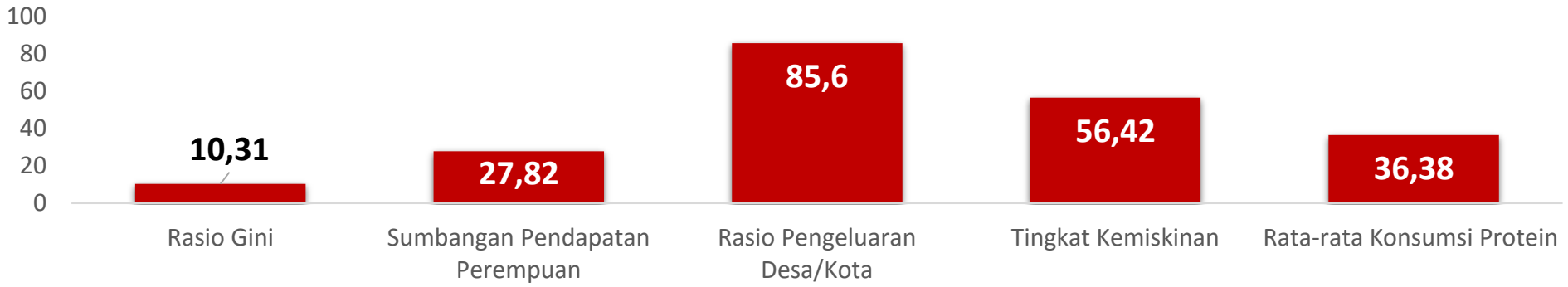


* Angka Rasio Gini dan Tingkat Kemiskinan yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan dan kemiskinan yang lebih besar

# PILAR 3: INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kementerian PPN/ Bappenas

## PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

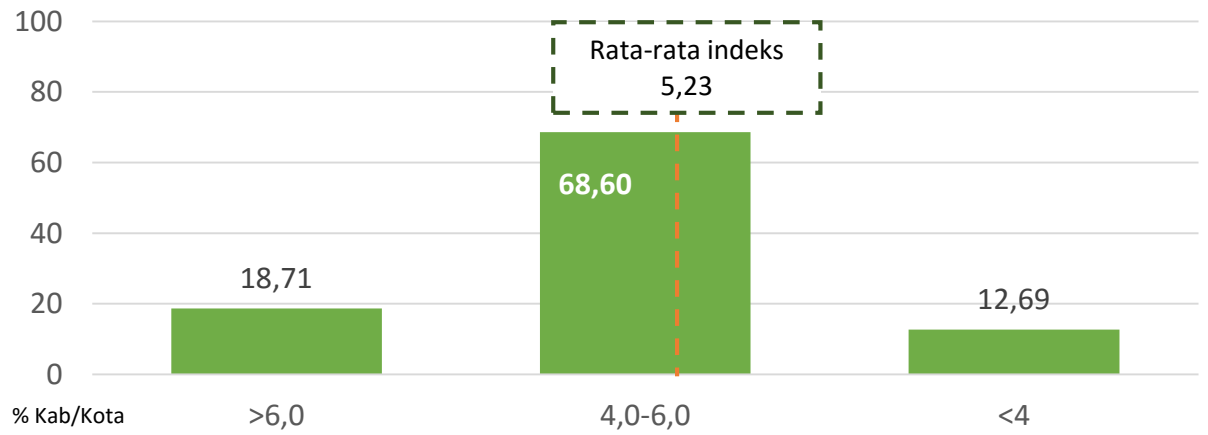


## PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

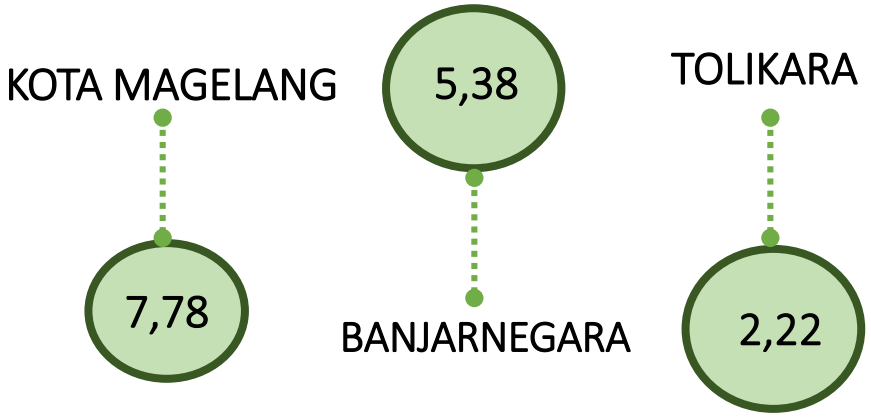


## PERSENTASE KAB/KOTA DENGAN ANGKA INDIKATOR DI ATAS ANGKA INDIKATOR NASIONAL

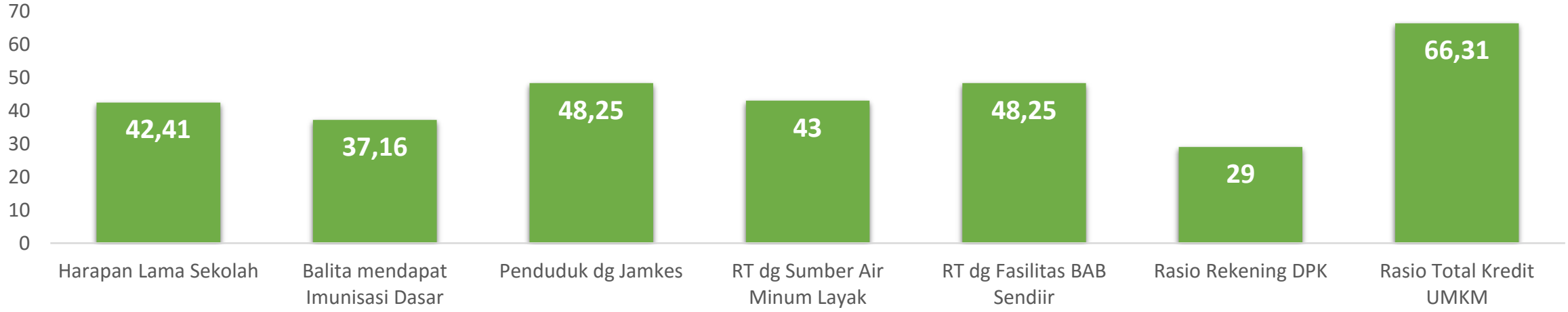

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI ACEH 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

Sumber: google.com

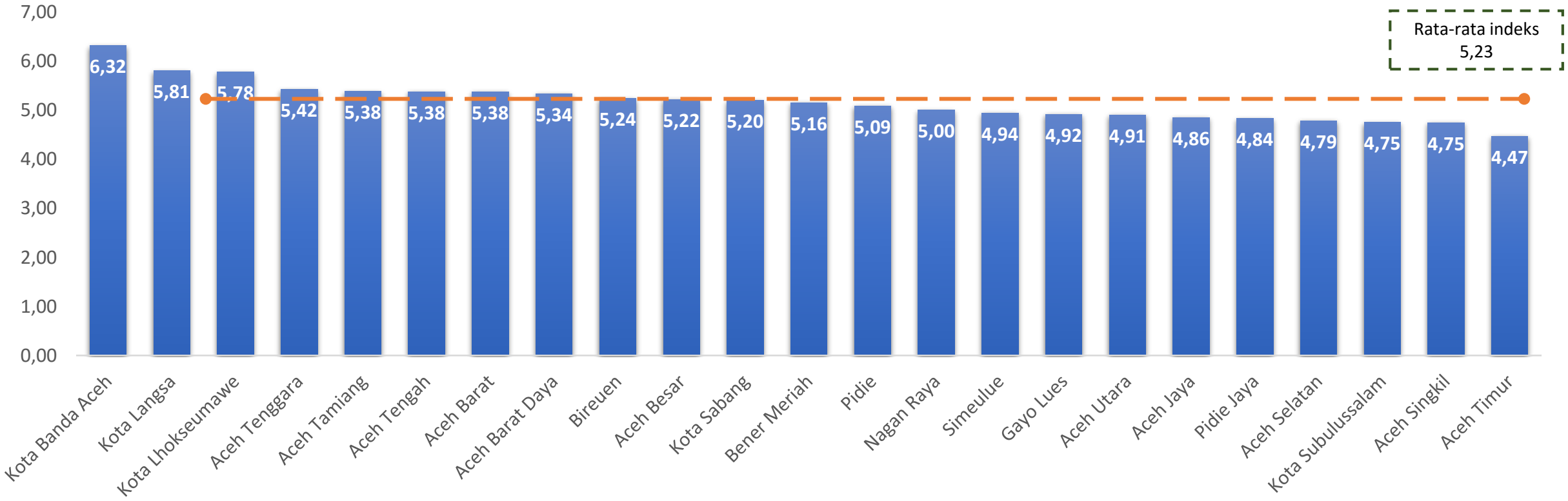

# ACEH

Kementerian PPN/ Bappenas

**Terdiri dari 23 Kab/Kota, Provinsi Aceh menduduki peringkat 22 dari 34 provinsi**
**pada tahun 2017**

**Kota Banda Aceh merupakan kota dengan angka indeks ke-6 tertinggi seluruh Indonesia**

INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF ACEH

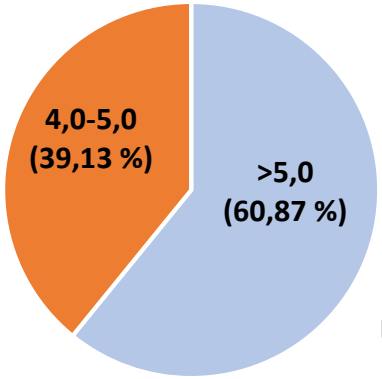


RATA-RATA INDEKS
5,17

INDEKS PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

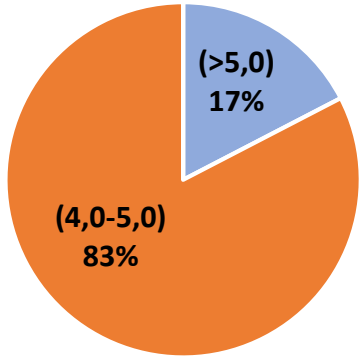


RATA-RATA INDEKS
4.75

INDEKS PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

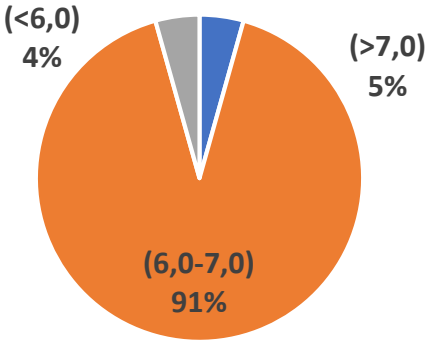


RATA-RATA INDEKS
6,38

INDEKS PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

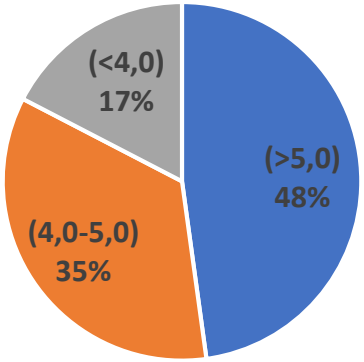


RATA-RATA INDEKS
5,05

# ACEH

Kementerian PPN/ Bappenas

## Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi terpusat di Kota Banda Aceh

Rata-rata pertumbuhan PDRB/kapita, *share manufaktur*, dan rasio kredit perbankan kab/kota di Aceh berada di bawah angka rata-rata nasional.

Kecuali **Kota Banda Aceh** yang pada setiap indikatornya lebih tinggi dari angka nasional.

Kota Banda Aceh sendiri menduduki peringkat ke-6 kab/kota paling inklusif.

Sumber: google.com

## Ketimpangan di Aceh sangat rendah

Seluruh kab/kota berada di bawah angka Gini nasional

Meski begitu tingkat kemiskinan di Aceh masih cukup tinggi di mana hanya Kota Banda Aceh yang memiliki angka kemiskinan di bawah angka kemiskinan nasional.

Ketimpangan dalam kab/kotanya sendiri cenderung rendah, namun ketimpangan antara Kota Banda Aceh dan kab/kota lainnya cukup signifikan.

## Aspek perluasan akses dan kesempatan masih rendah

Seluruh kab/kota di Aceh memiliki HLS di atas rata-rata nasional, namun untuk aspek infrastruktur dasar, dan rasio rekening DPK, lebih dari 50% kab/kota di Aceh masih di bawah angka nasional.

Aspek lain yang patut diapresiasi adalah rasio rekening kredit UMKM yang sudah tinggi.

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI ACEH 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

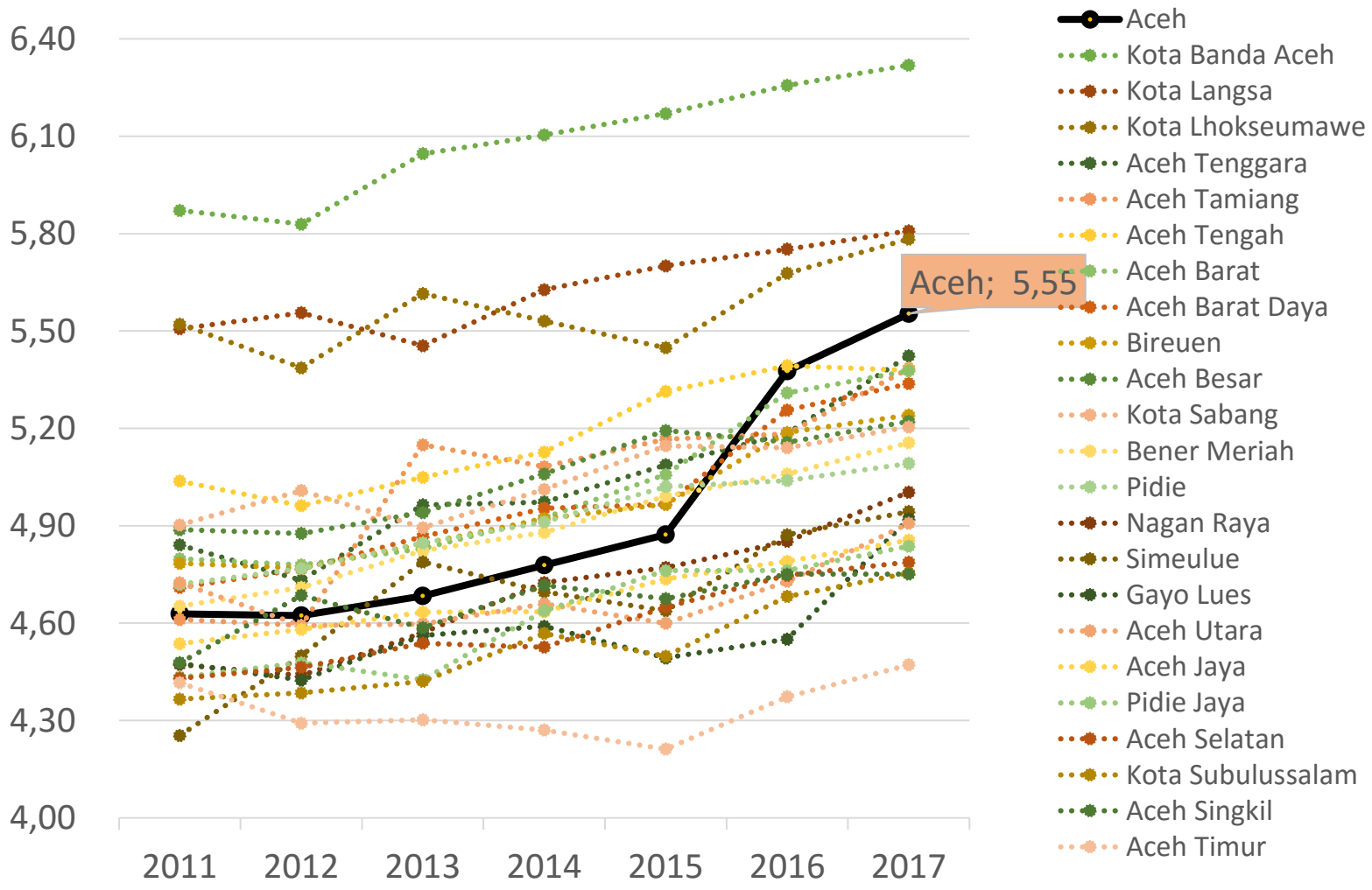


Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, politik, serta sosial budaya.
Fokus pembangunan dari provinsi terpusat di Kota Banda Aceh sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi serta akses dan kesempatan lebih terbuka lebar di sini.

Aceh Timur memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang rendah. Aktivitas perekonomian terpusat di sektor pertanian dan jasa, dan sedikit saja untuk sektor manufaktur.

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI BALI 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

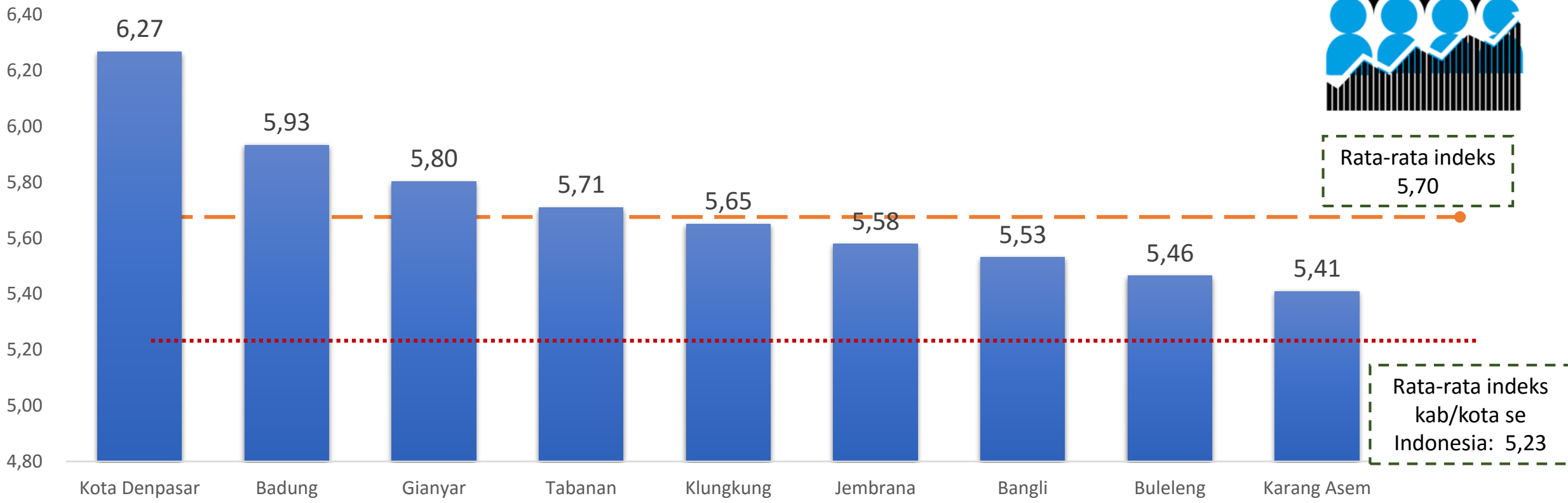

# BALI

Kementerian PPN/ Bappenas

**Terdiri dari 9 Kab/Kota, Provinsi Bali menduduki peringkat ke-2 dari 34 provinsi**
**pada tahun 2017**

**Kota Denpasar masuk ke dalam 10 besar kota dengan indeks pembangunan ekonomi inklusif tertinggi di Indonesia.**

INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF BALI

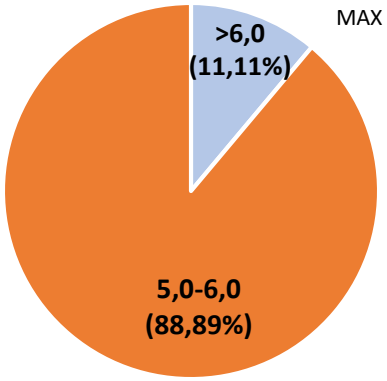


MAX (KOTA DENPASAR)
6,27

MIN (KARANGASEM)
5,41

**RATA-RATA INDEKS**
**5,7**

INDEKS PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

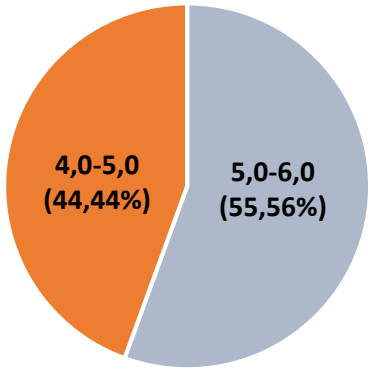


**RATA-RATA INDEKS**
**5,12**

INDEKS PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

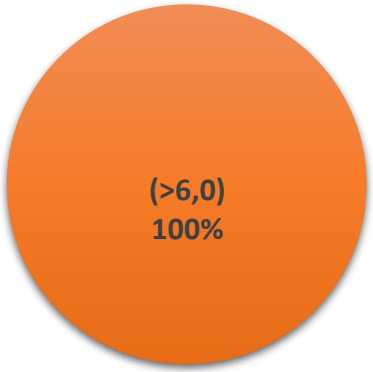


**RATA-RATA INDEKS**
**6,95**

INDEKS PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

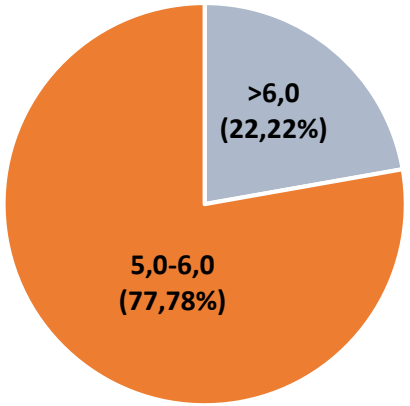


**RATA-RATA INDEKS**
**5,82**

# BALI

Kementerian PPN/ Bappenas

## Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi

Meski angka *share manufaktur* di Bali sangat rendah, pertumbuhan ekonomi di Bali sangat tinggi yang berpusat pada sektor jasa pariwisata.

## Ketimpangan dan kemiskinan yang relatif kecil.

Di Kota Denpasar dan Kab. Badung misalnya, angka **kemiskinan** hanya sekitar **2%** dan **rasio pengeluaran penduduk desa terhadap kota** adalah **1.03**, jauh lebih baik dari angka rata-rata nasional.

Seluruh kab/kota di Bali memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dari angka nasional.

Sumber: google.com

## Perluasan akses dan kesempatan di kab/kota Provinsi Bali masih perlu perhatian khusus.

Badung memiliki angka rasio jumlah rekening UMKM paling rendah di antara kab/kota lainnya, dan lebih rendah dari angka nasional.

Angka rasio kredit perbankan di Bali pun cenderung lebih rendah, hanya Kota Denpasar yang memiliki angka tinggi.

Catatan: Literasi keuangan di Bali masih rendah, sehingga pendirian kantor OJK di Bali pada tahun 2017 diharapkan dapat melakukan edukasi, literasi, pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan di masyarakat termasuk menyiapkan strategi perlindungan konsumen keuangan sebagai upaya melindungi konsumen jasa keuangan di Tanah Air

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI BALI 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

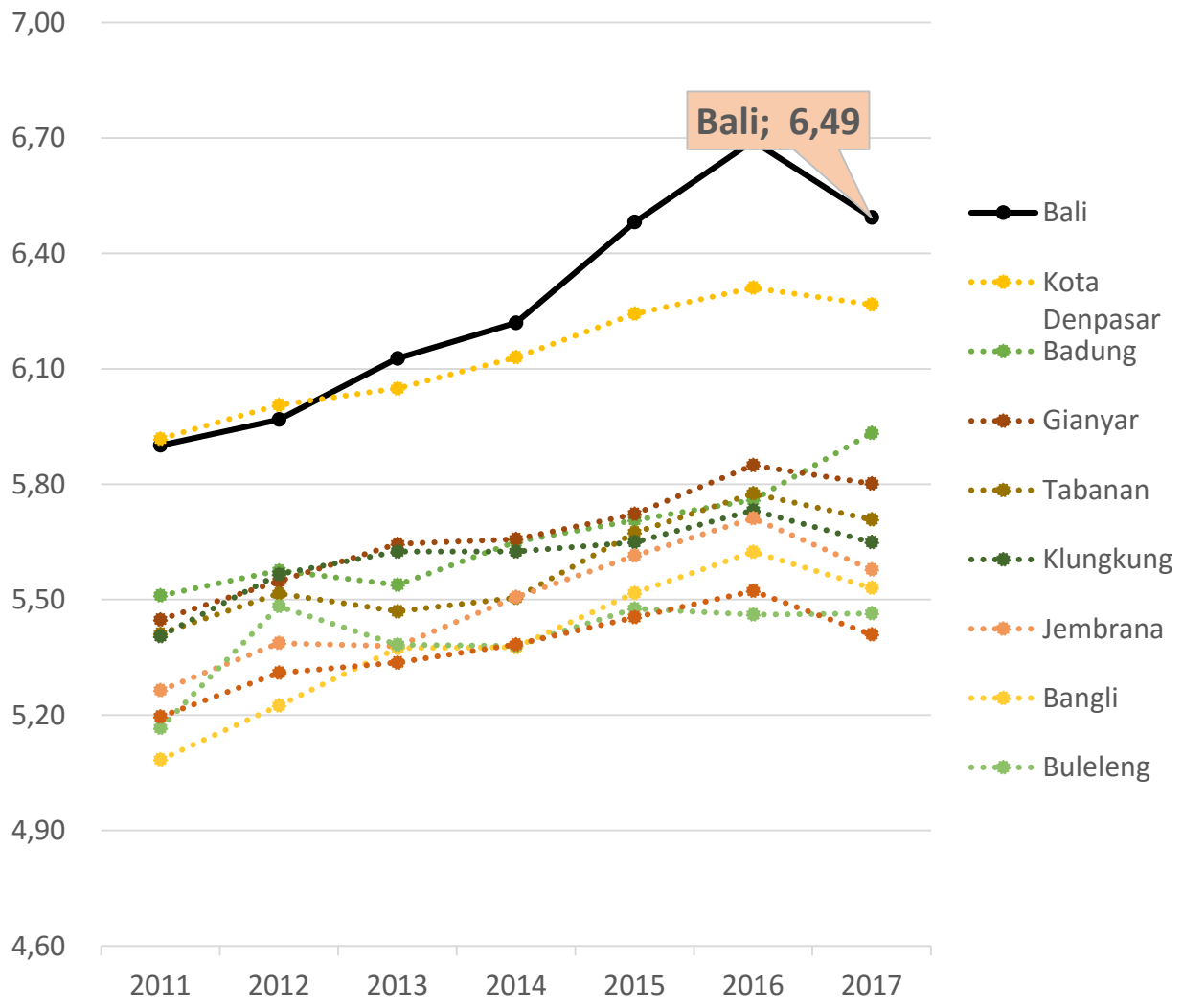


- Pertumbuhan ekonomi tinggi ditopang oleh sektor pariwisata (jasa, makanan, dan minuman)
- Kemiskinan dan ketimpangan rendah, karena tingginya kesempatan kerja dan banyaknya program afirmasi dari pemerintah
- Dua sisi mata uang dari adat dan budaya: menjadi faktor pendukung sekaligus juga dapat menghambat perekonomian
- Kesempatan kerja tinggi tetapi sebagian besar orang Bali lebih memilih bekerja di sektor informal
- Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan/permukiman atau hotel
- Terdapat ketimpangan infrastruktur antara wilayah utara dan selatan Bali

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017

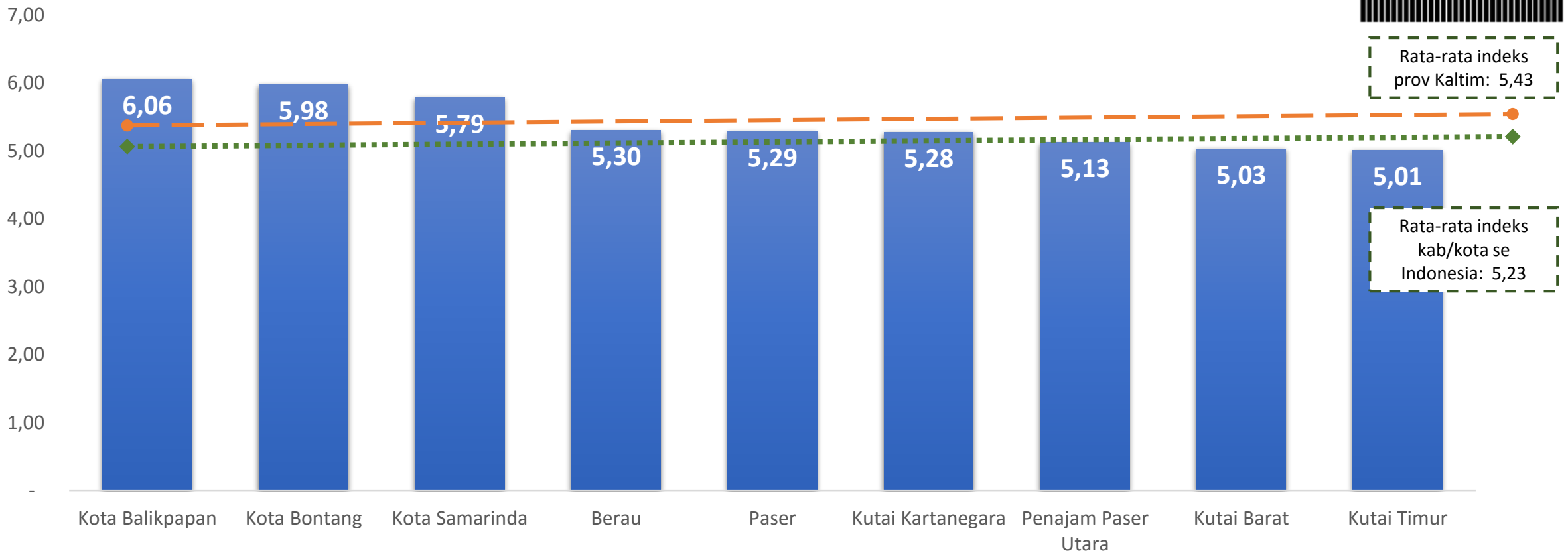

# KALIMANTAN TIMUR

Kementerian PPN/ Bappenas

**Terdiri dari 9 Kab/Kota, namun hanya ada 8 data yang tersedia.**
**Mahakam Hulu belum tersedia datanya.**

**Kota Balikpapan merupakan kota paling inklusif di Kaltim.**
**Peringkat 24 dari kab/kota seluruh Indonesia.**

INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF KALIMANTAN TIMUR

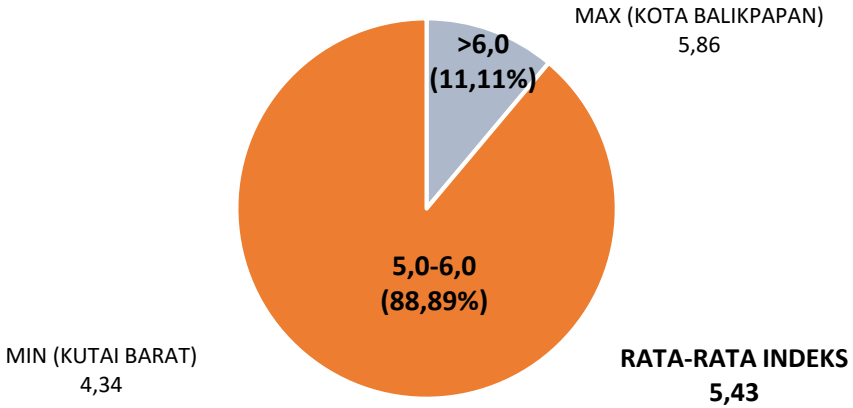


INDEKS PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

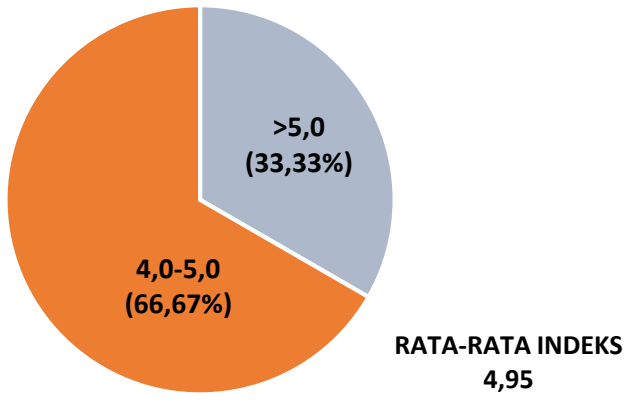


INDEKS PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

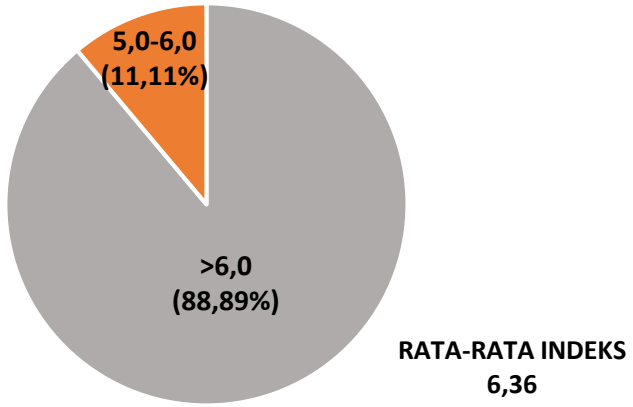


INDEKS PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

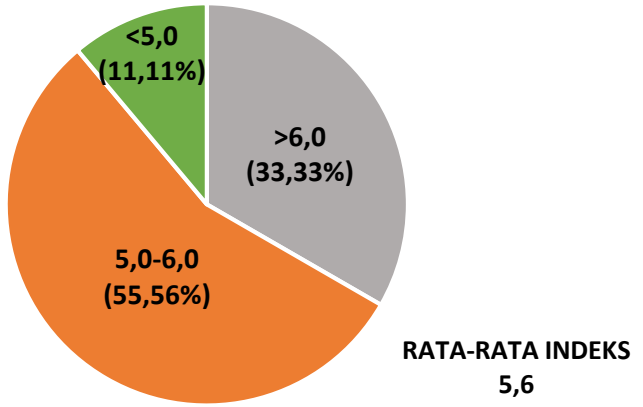

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

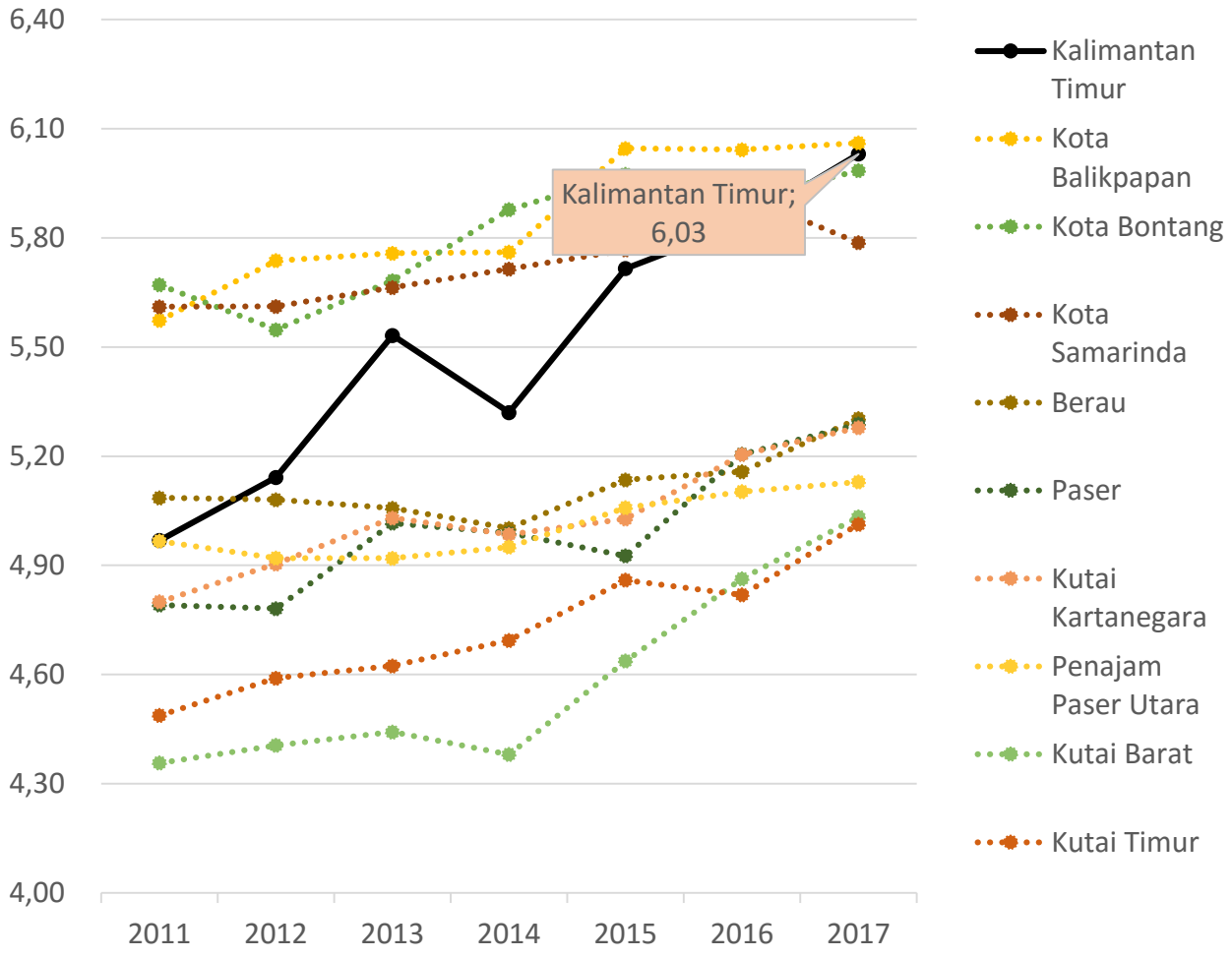


- Sektor pertambangan menjadi penopang perekonomian di Kaltim dan berkontribusi sangat besar terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Timur (tahun 2013 sebesar 55,21%).
- Kota Bontang memiliki *share manufaktur* sebesar 83%, yang tertinggi seluruh Indonesia. Sementara Kutai Timur dan Kutai Barat *share*-nya masih di bawah 7%.
- Persentase penduduk miskin cenderung mengalami tren penurunan. Di sisi lain Gini Ratio juga mengalami penurunan sejak tahun 2013 – 2015.
- Sebaran penduduk antarkabupaten/kota dan tingkat kepadatan penduduk antarwilayah di Kalimantan Timur sangat timpang

# KALIMANTAN TIMUR

Kementerian PPN/ Bappenas

## Pertumbuhan ekonomi di Kaltim ditopang oleh sektor manufaktur

**Kota Balikpapan dan Bontang** dengan **tingkat inklusivitas tertinggi karena** memiliki share manufaktur sebesar **46%.** Sementara **Kutai Timur** hanya memiliki **3.04%** *share manufaktur.*

Sumber: google.com

## Perluasan akses dan kesempatan belum merata

Persentase RT dengan sumber air minum layak di Mahakam Hulu masih **29%,** jauh lebih rendah dari angka nasional. Sementara rasio rekening DPK di Penajam Paser Utara juga hanya **0.29**, lebih rendah dari angka nasional.

## Ketimpangan di dalam kab/kota masing-masing sudah rendah

Meski angka rasio Gini secara umum lebih rendah dari angka nasional, masih terdapat kab/kota dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Di Kutai Barat dan Mahakam Hulu, rasio Gininya hanya **0,27**. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 0,39.

Namun angka kemiskinan di Mahakam Hulu mencapai **11.29%.**

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

**Sepertiga kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki indeks dibawah rata-rata nasional**

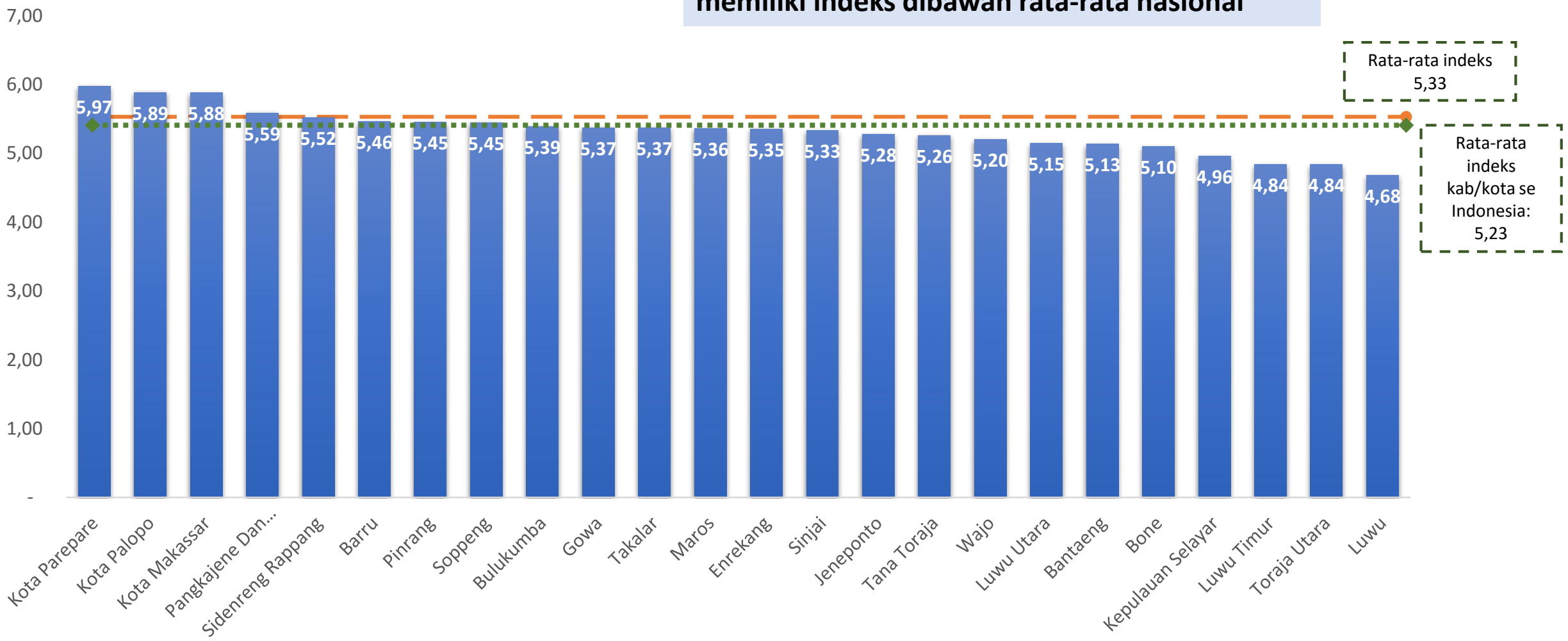

# SULAWESI SELATAN

Kementerian PPN/ Bappenas

**Terdiri dari 24 Kab/Kota, Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat 17 dari 34 provinsi pada tahun 2017**

INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF SULAWESI SELATAN

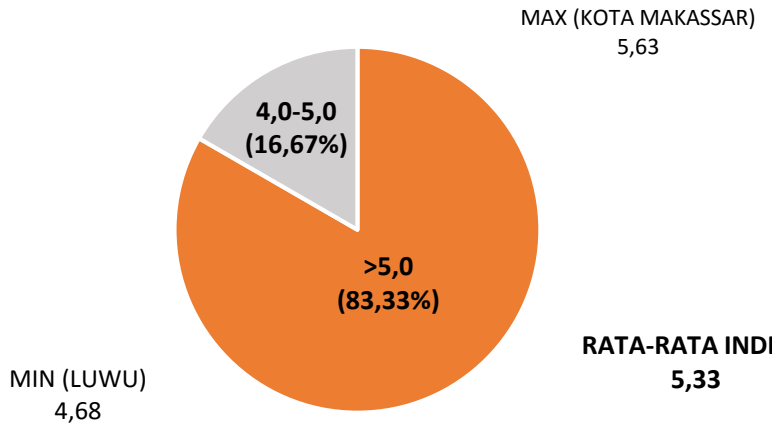


INDEKS PILAR 1: PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN EKONOMI

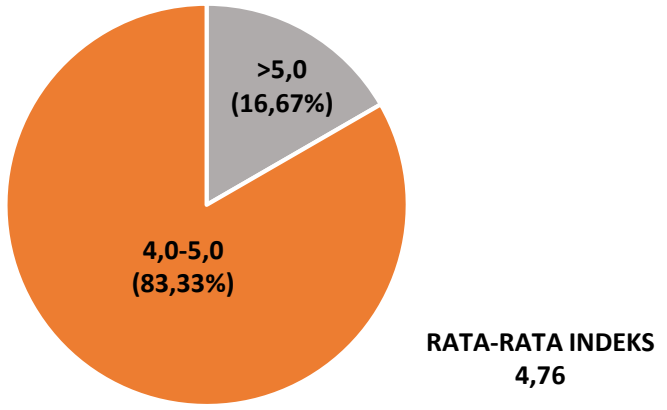


INDEKS PILAR 2: PEMERATAAN PENDAPATAN DAN PENGURANGAN KEMISKINAN

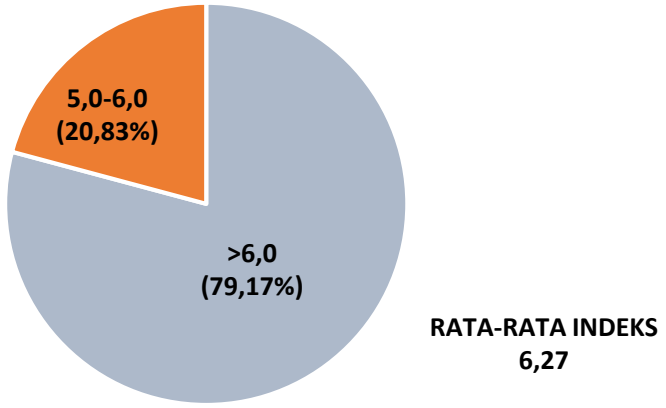


INDEKS PILAR 3: PERLUASAN AKSES DAN KESEMPATAN

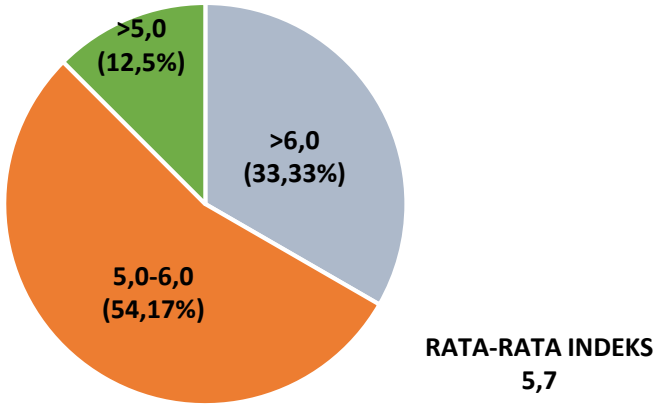

# SULAWESI SELATAN

Kementerian PPN/ Bappenas

## Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional

Perekonomian ditopang secara dominan oleh sektor pertanian. Hanya **Pangkajene dan Kepulauan** yang memiliki *share manufaktur* **sebesar 52,23%,** yang berada di atas angka nasional.

Sumber: google.com

## Ketimpangan antar Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan Sangat Tinggi.

Disparitas antar wilayah di Sulawesi Selatan sangat tinggi, terlihat dari persentase penduduk miskin yang berbeda jauh antar wilayahnya. Misal di **Jeneponto** persentasenya mencapai **15,4%** sedangkan di **Kota Makassar hanya 4,59%.** Hal ini karena mayoritas perekonomian berpusat di perkotaan yang memiliki kondisi infrastruktur yang baik sehingga menunjang iklim investasi dan jasa perdagangan berkembang.

## Terdapat perbedaan tingkat keuangan inklusif antara Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan

Tingkat keuangan inklusif di Kota lebih tinggi **tiga kali lipat** dibandingkan dengan Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat dari Rasio Jumlah Rekening DPK terhadap Jumlah Penduduk Usia Produktifnya yang berbeda cukup jauh.

# MENGAPA PANGKAJENE DAN KEPULAUAN?

Kementerian PPN/ Bappenas

Sumber: google.com

**PT Semen Tonasa (Persero)** adalah produsen semen terbesar di kawasan Indonesia Timur yang menempati lahan seluas 715 hektar di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep

- Pertumbuhan ekonomi di Pangkep sangat dipengaruhi oleh perkembangan perusahaan dan pasar yang dilakukan oleh PT Semen Tonasa.
- Jika industri semen ini meningkat dengan serapan pasar yang maksimal, maka akan mendatangkan pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi di Pangkep. Misalnya dengan banyaknya bangunan atau proyek jalan hingga insfrastruktyur lainnya yang menggunakan semen.

# INDEKS PEMBANGUNAN EKONOMI INKLUSIF DI PROVINSI SULAWESI SELATAN 2017

Kementerian PPN/ Bappenas

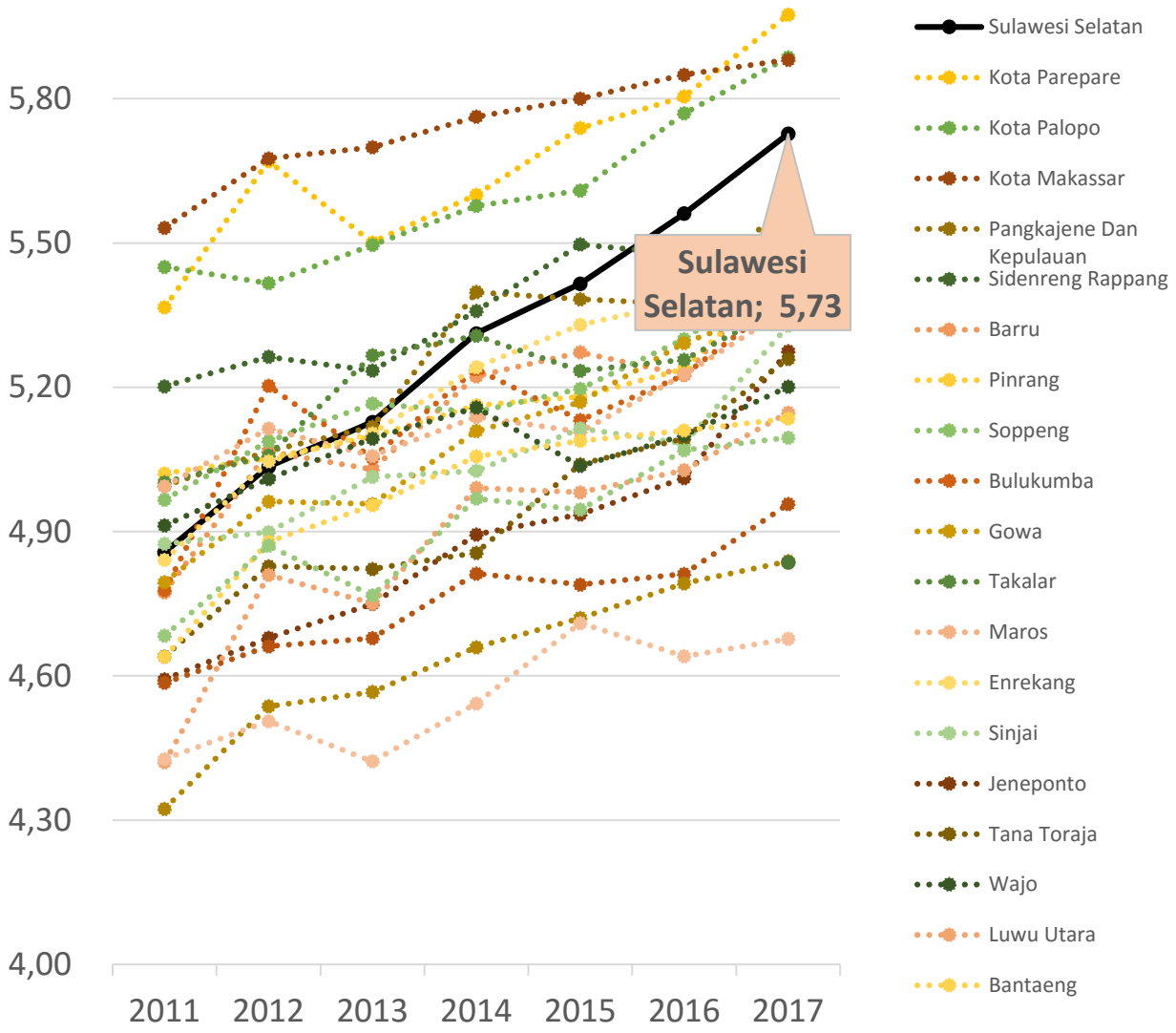


**Kota Pare-Pare** memiliki pertumbuhan PDRB/kapita di atas angka nasional **sebesar 5,3%** dan rasio kredit perbankan terhadap PDRB **97,78%** (dua kali lipat dari angka nasional).

Sementara Luwu, memiliki angka share manufaktur yang sangat rendah sebesar 4,15%.

# LANGKAH SELANJUTNYA

Kementerian PPN/ Bappenas

## LANDASAN KEBIJAKAN

Angka Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia dapat dijadikan landasan dalam menyusun kebijakan untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

## KERJA SAMA SELURUH PIHAK

Perlu kerja sama seluruh pihak (BPS dan OJK sebagai penyedia data, pemerintah daerah sebagai perumus kebijakan, serta para ahli) untuk dapat terus mengembangkan indeks serta menggunakannya sebagai pelengkap analisis pembangunan ekonomi lainnya.

Kementerian PPN/
Bappenas

# TERIMA KASIH

# Konsep Pembangunan Ekonomi Inklusif Untuk Indonesia

Kementerian PPN/ Bappenas

**DEFINISI**
**Pembangunan Ekonomi Inklusif**

*Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah*

**PILAR I:**
Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

(0.50)

**PILAR II:**
Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan
(0.25)

**PILAR III:**
Perluasan Akses dan Kesempatan

(0.25)

**Sub-Pilar:**
1. Pertumbuhan Ekonomi (0,33)
2. Kesempatan Kerja (0,33)
3. Infrastruktur Ekonomi (0,33)

**Sub-Pilar:**
1. Ketimpangan (0,50)
2. Kemiskinan (0,50)

**Sub-Pilar:**
1. Kapabilitas Manusia (0,33)
2. Infrastruktur Dasar (0,33)
3. Keuangan Inklusif (0,33)

**TOTAL: 21 INDIKATOR YANG TERSEDIA DI 34 PROVINSI PADA TAHUN 2015-2017**

**TOTAL INDIKATOR**

**21**

**DATA**

Data per Provinsi di Indonesia untuk tahun 2015-2017
**(34 PROVINSI)**

# DISAGREGASI INDEKS INKLUSIF DI KABUPATEN/KOTA

Kementerian PPN/ Bappenas

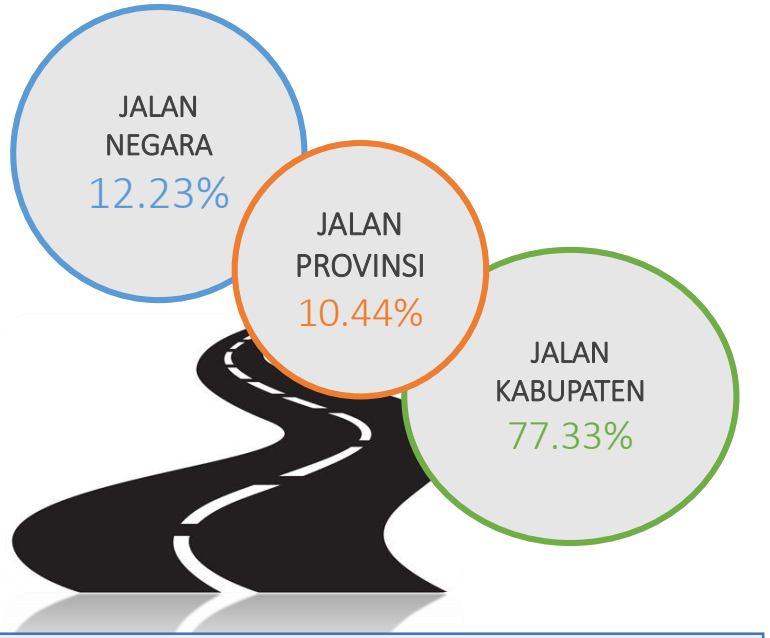


Indikator rasio jalan terhadap luas wilayah (Indikator 9) menggunakan data jumlah panjang jalan kabupaten, sementara kota di provinsi Jakarta tidak memiliki jalan kabupaten, sehingga tidak diperhitungkan dalam indeks.

Indikator ketenagakerjaan (Indikator 4,5,6, dan 11) di tahun 2016 merupakan angka interpolasi karena data SAKERNAS di tahun tersebut tidak mencukupi sampelnya.

- Indikator Tingkat Kesempatan Kerja
- Indikator Penduduk Bekerja Penuh (lebih dari 35 jam/minggu)
- Indikator Penduduk Bekerja Berkualitas (pendidikan min. SMA ke atas)
- Indikator Sumbangan Pendapatan Perempuan

29 DAERAH TIDAK MEMILIKI WILAYAH PERKOTAAN

38 DAERAH TIDAK MEMILIKI WILAYAH PERDESAAN

Formula dan bobot perhitungan indeks di tingkat kabupaten/kota sama dengan perhitungan di tingkat provinsi/nasional. Untuk kabupaten/kota yang tidak memiliki desa atau kota, bobot di pilar 2 disesuaikan.